



DP3AKB
Provinsi Sumatera Utara

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH [LKIP] TA. 2025



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

**KOLABORASI
SUMUT BERKAH**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan.

LKIP ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara selama Tahun 2025, sekaligus sebagai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan ini menyajikan capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan serta menggambarkan efektivitas pemanfaatan sumber daya.

Melalui LKIP ini diharapkan dapat memberikan gambaran capaian kinerja dan menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja pada periode selanjutnya dalam mendukung pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pembangunan keluarga yang berkualitas di Provinsi Sumatera Utara.

Kami menyadari laporan ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, saran dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan. Semoga LKIP ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan.

Medan, Februari 2026

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA

DWI ENDAH PURWANTI, S.S, M.Si
NIP. 197301231998032002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Penjelasan Umum Organisasi.....	2
1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2
1.2.2 Anggaran.....	15
1.3 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	16
1.4 Dasar Hukum.....	17
1.5 Sistematika Laporan Kinerja	18
BAB II	19
PERENCANAAN KINERJA	19
2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	19
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2025	25
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	25
BAB III	37
AKUNTABILITAS KINERJA	37
A. Capaian Kinerja	37
3.1 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan	38
3.2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.....	48

3.3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.....	50
3.4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional	52
3.5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	53
3.6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	62
3. 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.	64
B. Realisasi Anggaran	86
BAB IV	98
PENUTUP	98

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Perbandingan Anggaran tahun 2024 dan tahun 2025	16
Tabel 2. 1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis	19
Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama perangkat Daerah tahun 2025	21
Tabel 2. 3 Rencana Kinerja Tahun 2025 Dinas P3AKB Provsu	25
Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025	26
Tabel 2. 5 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025	27
Tabel 3. 1 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja tahun 2025	38
Tabel 3. 2 Perbandingan Capaian Kinerja	48
Tabel 3. 3 kemajuan Capaian Sasaran Strategis	50
Tabel 3. 4 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran	63
Tabel 3. 5 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan	65
Tabel 3. 6 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara	15
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap perangkat daerah yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja, menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Sehubungan dengan hal tersebut maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKIP).

Penyusunan LKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah. Penyusunan pelaporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

1.2 Penjelasan Umum Organisasi

Berikut adalah penjelasan umum organisasi berkaitan dengan struktur organisasi dan anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara :

1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera mempunyai tugas bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi Kewenangan Provinsi, dengan beberapa fungsi sbb :

- a. penyelenggaraan koordinasi perumusan kebijakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

- b. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan kebijakan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- d. pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pengawasan kebijakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- e. pelaksanaan administrasi pendukung kebijakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- f. penyusunan dan penyampaian laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut diatas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara didukung oleh struktur organisasi yang telah diatur dalam Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara maka susunan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara terdiri dari :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;

- c. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak;
- d. Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga;
- e. Bidang Pengendalian Penduduk;
- f. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; dan
- g. UPT Perlindungan Perempuan dan Anak;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

A. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas pengendalian, pengawasan, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi penyusunan kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- b. koordinasi pelaksanaan pengendalian, pengawasan, pembinaan, monitoring dan evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- c. koordinasi dan penyusunan target kinerja dan akuntabilitas kinerja;
- d. penatausahaan dan pelaporan keuangan;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang dan jasa;
- f. pembinaan, penataan organisasi dan tata laksana;

- g. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- h. pengelolaan data dan informasi; dan i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat terdiri atas :

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- b. Kelompok Jabatan Fungsional pada jabatan Analis Keuangan Pusat/ Daerah Ahli Muda
- c. Kelompok Jabatan Fungsional pada jabatan Perencana Ahli Muda

1) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:

- a. melaksanakan pengumpulan data, bahan dan referensi Urusan Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan penyusunan perencanaan program kerja kegiatan dan program kerja pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. melaksanakan penyusunan dan pengelolaan data umum dan kepegawaian;
- d. memfasilitasi penyusunan norma dan kriteria pelayanan kelembagaan, ketata laksanaan, administrasi umum dan kepegawaian;
- e. melaksanakan administrasi kearsipan, penerimaan, pendistribusian surat-surat, naskah dan dokumen penting lainnya;

- f. melaksanakan pengendalian dan fasilitasi rapat-rapat, keprotokolan, hubungan masyarakat;
- g. melaksanakan koordinasi perencanaan kebutuhan rumah tangga, kebutuhan aset, perlengkapan dan peralatan, barang bergerak dan barang tidak bergerak pada Dinas;
- h. melaksanakan monitoring pengelolaan, penataan kebutuhan rumah tangga dan pemeliharaan aset, perlengkapan serta peralatan Dinas;
- i. melaksanakan persiapan dan tindaklanjut kelengkapan administrasi mutasi, kenaikan pangkat dan promosi pegawai, usulan kebutuhan pegawai, cuti pegawai, kenaikan gaji berkala dan pensiun, urusan karpeg, karis/karsu, taspen dan kesejahteraan pegawai lainnya;
- j. melaksanakan penyiapan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;
- k. melaksanakan persiapan usulan pegawai yang akan mengikuti diklat teknis dan fungsional;
- l. melaksanakan penilaian atas prestasi kerja bawahan dengan membuat catatan dalam buku penilaian sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan SKP (Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil) bawahan;
- m. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi administrasi kepegawaian dan perlengkapan; ‘
- n. melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan sesuai dengan tugasnya;
- o. melaksanakan pemberian masukan kepada Sekretaris, sesuai dengan tugasnya;
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris;
- q. melaksanakan penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai ketentuan yang berlaku.

B. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di daerah.

Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan koordinasi penyusunan, pelaksanaan, penguatan dan evaluasi kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan;
- b. penyelenggaraan koordinasi pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi;
- c. penyelenggaraan koordinasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
- d. penyelenggaraan koordinasi, pengendalian, pengawasan, pembinaan, monitoring dan evaluasi kinerja Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
- e. pelaksanaan kebijakan teknis Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
- f. penyelenggaraan pelaporan akuntabilitas kinerja.

Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, terdiri atas :

- a. Kelompok jabatan fungsional, pada jabatan Analis Kebijakan Ahli Muda;
- b. Kelompok jabatan fungsional, pada jabatan Analis Pemberdayaan Perempuan dan Anak;
- c. Kelompok Jabatan fungsional, pada jabatan Penyuluh Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak; dan
- d. Pengadministrasi Umum.

C. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak

Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak di daerah.

Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan koordinasi penyusunan, pelaksanaan, penguatan dan evaluasi kebijakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. penyelenggaraan koordinasi penanganan perlindungan hak perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- c. penyelenggaraan koordinasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak;
- d. penyelenggaraan koordinasi, pengendalian, pengawasan, pembinaan, monitoring dan evaluasi kinerja Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak;
- e. pelaksanaan kebijakan teknis Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak;
- f. penyelenggaraan pelaporan akuntabilitas kinerja.

Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, terdiri atas :

- a. Kelompok jabatan fungsional, pada jabatan Analis Kebijakan Ahli Muda
- b. Kelompok jabatan fungsional, pada jabatan Analis Data dan Informasi

D. Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga

Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga.

Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan koordinasi penyusunan, pelaksanaan, penguatan dan evaluasi kebijakan Pemenuhan Hak Anak dan Peningkatan Kualitas Keluarga;
- b. penyelenggaraan koordinasi upaya Pemenuhan Hak Anak dan peningkatan kualitas keluarga;
- c. penyelenggaraan koordinasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Pemenuhan Hak Anak dan peningkatan kualitas keluarga;
- d. penyelenggaraan koordinasi, pengendalian, pengawasan, pembinaan, monitoring dan evaluasi kinerja Pemenuhan Hak Anak dan peningkatan kualitas keluarga;
- e. pelaksanaan kebijakan teknis Pemenuhan Hak Anak dan peningkatan kualitas keluarga;
- f. penyelenggaraan pelaporan akuntabilitas kinerja.

Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga, terdiri atas :

- a. Kelompok jabatan fungsional, pada jabatan Analis Kebijakan Ahli Muda;
- b. Analis Informasi; dan
- c. Pengadministrasi Umum

E. Bidang Pengendalian Penduduk

Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk.

Bidang Pengendalian Penduduk menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan koordinasi penyusunan, pelaksanaan, penguatan dan evaluasi kebijakan Pengendalian Penduduk;
- b. penyelenggaraan koordinasi upaya Pengendalian Penduduk;
- c. penyelenggaraan koordinasi, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Pengendalian Penduduk;
- d. penyelenggaraan koordinasi, pengendalian, pengawasan, pembinaan, monitoring dan evaluasi kinerja Pengendalian Penduduk;
- e. pelaksanaan kebijakan teknis Pengendalian Penduduk;
- f. penyelenggaraan pelaporan akuntabilitas kinerja.

Bidang Pengendalian Penduduk, terdiri atas :

- a. Kelompok jabatan fungsional, pada jabatan Analis Kebijakan Ahli Muda;
- b. Penyusun Pencatatan dan Pelaporan Data Kependudukan dan KB;
- c. Penyusun Kependudukan dan KB;
- d. Penyusun Bahan Data Kependudukan dan Keluarga Berencana;
- e. Pengelola Data Pengendalian Masyarakat.

F. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan koordinasi penyusunan, pelaksanaan, penguatan dan evaluasi kebijakan Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- b. penyelenggaraan koordinasi Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- c. penyelenggaraan koordinasi, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- d. penyelenggaraan koordinasi, pengendalian, pengawasan, pembinaan, monitoring dan evaluasi kinerja Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- e. pelaksanaan kebijakan teknis Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- f. penyelenggaraan pelaporan akuntabilitas kinerja.

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, terdiri atas :

- a. Kelompok jabatan fungsional, pada jabatan Analis Kebijakan Ahli Muda;
- b. Analis Kesejahteraan Keluarga;
- c. Analis Pembinaan Keluarga Berencana;
- d. Penyusun Bahan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga;
- e. Pengelola Pembinaan Ketahanan Keluarga.

G. UPT Perlindungan Perempuan dan Anak

UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang

mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak menyelenggarakan fungsi :

- a. pengaduan masyarakat;
- b. penjangkauan korban;
- c. pengelolaan kasus;
- d. penampungan sementara;
- e. mediasi;
- f. pendampingan korban;
- g. penyelenggaraan pengawasan, pengendalian dan evaluasi kinerja program dan kegiatan;
- h. penyelenggaraan pelaporan akuntabilitas kinerja

PTD Perlindungan Perempuan dan Anak, terdiri atas :

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Pengaduan;
- c. Seksi Tindak Lanjut.

1) Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha memiliki uraian tugas :

- a. melaksanakan pengumpulan data/bahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD;
- b. melaksanakan penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran;
- c. melaksanakan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- d. melaksanakan penyiapan administrasi sumber daya manusia, seperti pengolahan data kepegawaian;

- e. melaksanakan ketatausahaan, seperti melaksanakan administrasi/penatausahaan, penerimaan, pendistribusian surat-surat, naskah dinas, arsip serta barang bergerak dan barang tidak bergerak;
- f. melaksanakan pencatatan data korban;
- g. melaksanakan kerumahtanggaan, seperti penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan, keamanan dan layanan kantor;
- h. melaksanakan evaluasi hasil kerja Subbagian Tata Usaha;
- i. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya;
- k. melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala UPTD, sesuai bidang tugasnya;

2) Seksi Pengaduan mempunyai uraian tugas :

- a. melaksanakan pengumpulan data/bahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD;
- b. melaksanakan penerimaan dan klarifikasi pengaduan masyarakat;
- c. melaksanakan penjangkauan korban yang dilaporkan secara tidak langsung;
- d. melaksanakan pengelolaan kasus;
- e. melaksanakan layanan perlindungan korban dan penampungan sementara di Rumah Perlindungan;
- f. melaksanakan layanan mediasi sebelum proses hukum (non litigasi);
- g. melaksanakan evaluasi hasil kerja Seksi Pengaduan;

- h. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya;
- j. melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala UPTD, sesuai bidang tugasnya.

3) Seksi Tindak Lanjut mempunyai uraian tugas :

- a. melaksanakan pengumpulan data/bahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD;
- b. melaksanakan mediasi yang berkaitan dengan proses hukum (litigasi);
- c. melaksanakan pendampingan hukum pada saat proses diversi, restitusi dan pendampingan pada saat proses peradilan, serta bantuan hukum lainnya;
- d. melakukan pendampingan korban dalam upaya pemulihan;
- e. melaksanakan evaluasi hasil kerja Seksi Tindak Lanjut;
- f. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya;
- h. melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala UPTD, sesuai bidang tugasnya.

H. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional yang mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan keahlian masing-masing. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut :

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara



Sumber : Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah

1.2.2 Anggaran

Pada bagian ini menjelaskan sumber dan besaran anggaran yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara. Berikut adalah Anggaran yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara :

Tabel 1. 1 Perbandingan Anggaran tahun 2024 dan tahun 2025

Sumber	Tahun	Jumlah
(1)	(2)	(3)
Urusan PPPA		
APBD	Tahun 2024	Rp 17.592.571.468
APBD	Tahun 2025	Rp 19.016.512.182
Urusan PPKB		
APBD	Tahun 2024	Rp 174.770.700
APBD	Tahun 2025	Rp. 351.393.900

Sumber : LRA BKAD Provsu

1.3 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Beberapa hal yang menjadi permasalahan terkait pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana, yang masuk dalam agenda pembangunan pada tahun 2024 yaitu :

- a. Lemahnya integrasi Pengarusutamaan Gender ke dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;
- b. Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- c. Belum Optimalnya upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO);
- d. Belum optimalnya upaya peningkatan kualitas hidup anak melalui Provinsi Layak Anak
- e. Belum optimalnya pemanfaatan data gender dan anak dalam perencanaan pembangunan daerah;
- f. Belum seimbangya pertumbuhan penduduk, dan
- g. Belum optimalnya upaya ber KB dalam mewujudkan keluarga yang berkualitas.
- h.

Isu Strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang sedang berkembang dan akan dihadapi untuk masa yang akan datang,

sebagaimana pemetaan urusan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana serta urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah :

1. Kesenjangan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
2. Perlindungan Perempuan dan Anak ;
3. Pemenuhan Hak Anak;
4. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)
5. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
6. Ketahanan Keluarga.

1.4 Dasar Hukum

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 ini disusun berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah.

1.5 Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

- 1 Perjanjian Kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara adalah : Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak serta Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas.

Adapun sasaran pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 - 2029 adalah:

1. Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
2. Meningkatkan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak;
3. Meningkatkan Implementasi Pemenuhan Hak Anak
4. Meningkatkan Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Penduduk
5. Meningkatkan Pembangunan Kualitas Keluarga Sejahtera

Berikut adalah indikator kinerja dan target kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara :

Tabel 2. 1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Meningkatnya Kesetaraan gender dan Perlindungan Anak serta Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas	Indeks pembangunan Gender (IPG)	Indeks	91,76	92,01	92,27	92,53	92,78	92,98
2.		Indeks Ketimpangan gender (IKG)	Indeks	0,395	0,390	0,386	0,382	0,377	0,373
3.		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	indeks	63,70	64,9	66,2	67,6	69,1	70,7

4.		Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	61,32	62,49	63,66	64,86	66,08	67,32
No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	persen	23,81	35,71	47,62	59,52	71,43	100
2	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Per 100.000 penduduk perempuan	11,20	11,18	11,15	11,10	11,05	11,00
		Rasio Kekerasan terhadap Anak (per 10.000 anak)	Per 10.000 Anak	2,7	2,65	2,6	2,5	2,1	2,0
3	Meningkatnya Implementasi pemenuhan Hak Anak	Persentase Intervensi Kluster Hak Anak	persen	57,14	66,67	76,19	85,71	92,86	100
4	Meningkatnya Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Penduduk	Indeks Pembangunan Berwawasan kependudukan (IPBK)	indeks	66,70	67,30	67,90	68,50	69,10	69,00
5	Meningkatnya Pembangunan Kualitas Keluarga Sejahtera	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	indeks	71,04	71,96	72,66	73,22	73,67	74,33

Sumber : Renstra Dinas P3AKB Provsu Tahun 2025 – 2029

Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama perangkat Daerah tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
1.	Meningkatnya Kesetaraan gender dan perlindungan Anak serta Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas	Meningkatnya kesetaraan gender dan kualitas hidup perempuan	Indeks pembangunan Gender (IPG)	Indeks	Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator yang menggambarkan perbandingan tingkat pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki. IPG menunjukkan sejauh mana kesenjangan capaian pembangunan manusia menurut jenis kelamin dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu: 1. Kesehatan Diukur dengan Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH) perempuan dan laki-laki. 2. Pendidikan Diukur dengan: - o Rata-rata Lama Sekolah (RLS) perempuan dan laki-laki - o Harapan Lama Sekolah (HLS) perempuan dan laki-laki	$IPG = \left(\frac{IPM \text{ Perempuan}}{IPM \text{ Laki-laki}} \right) \times 100$	BPS

					3. Standar Hidup Layak Diukur dengan Pengeluaran per kapita yang disesuaikan menurut jenis kelamin.		
2.	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan berkelanjutan	Indeks Ketimpangan gender (IKG)	Indeks	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah indikator komposit yang mengukur kehilangan capaian pembangunan manusia akibat ketimpangan antara perempuan dan laki-laki dalam tiga dimensi utama, yaitu: 1. Kesehatan Reproduksi Diukur melalui: - Angka Kematian Ibu (AKI) - Angka Kelahiran Remaja (AKR) 2. Pemberdayaan Diukur melalui: - Persentase keterwakilan perempuan di parlemen - Persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan minimal SMA menurut jenis kelamin 3. Pasar Tenaga Kerja Diukur melalui:	IKG = $1 - \left(\sqrt[3]{I_{KR} \times I_P \times I_{TK}} \right)$ Keterangan: I_{KR} = Indeks Kesehatan Reproduksi I_P = Indeks Pemberdayaan I_{TK} = Indeks Partisipasi Tenaga Kerja	BPS	

				o Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan dan laki-laki		
3.	Meningkatnya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	indikator yang menggambarkan pencapaian pembangunan perlindungan dan jaminan terhadap Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi	$IPA = \sum_{j=1}^5 (W_j \times \text{Indeks } K_j)$	Kemen PPPA
4.	Meningkatnya kualitas pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pembangunan keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	indeks	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan ukuran program pembangunan keluarga yang ditunjukkan melalui dimensi ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga yang dibentuk dari 17 variabel serta menggambarkan peran dan fungsi keluarga. Nilai iBangga berkisar antara 0-100 dengan kategori sebagai berikut: a. iBangga yang kurang baik (rentan) apabila nilainya di bawah 40. b. iBangga yang	Ibangga = 1/3 (Indeks Ketentraman + Indeks Kemandirian + Indeks Kebahagiaan) x 100	BKKBN

				cukup baik (berkembang) apabila nilainya antara 40–70. c. iBangga yang baik (tangguh) apabila nilainya di atas 70		
--	--	--	--	---	--	--

Sumber: Indikator Kinerja Utama Dinas P3AKB Provsu Tahun 2025

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2025

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2025 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Berikut Rencana Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025:

Tabel 2. 3 Rencana Kinerja Tahun 2025 Dinas P3AKB Provsu

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025
1.	Meningkatnya Kesetaraan gender dan perlindungan	Meningkatnya kesetaraan gender dan kualitas hidup perempuan	Indeks pembangunan Gender (IPG)	Indeks	91,36
2.	Anak serta Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan berkelanjutan	Indeks Ketimpangan gender (IKG)	Indeks	0,41
3.		Meningkatnya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	63,70
4.		Meingkatkan kualitas pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pembangunan keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	indeks	61,32

Sumber : Rencana Kerja Dinas P3AKB Provsu Tahun 2025

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kesetaraan gender dan kualitas hidup perempuan	Indeks pembangunan Gender (IPG)	91,36
2	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan berkelanjutan	Indeks Ketimpangan gender (IKG)	0,41
3	Meningkatnya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	63,7
4	Meingkatkan kualitas pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pembangunan keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	61,34

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas P3AKB Provsu Tahun 2025

Pada Perjanjian Kinerja 2025 dan Perjanjian Kerja Perubahan Tahun 2025 tidak terdapat perubahan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, maupun target Indikator Kinerja. Hanya terdapat perubahan pada jumlah anggaran pada beberapa program.

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan selaras dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 :

Tabel 2. 5 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator	Target
I	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		Persentase Anggaran yang Responsif Gender (ARG) pada Belanja Operasi APBD Provinsi	100 %
I.1	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi			
	1	Koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG tingkat provinsi	2 laporan
	2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	4 dokumen
I.2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi			
	3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/	4 lembaga

		Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	media tingkat provinsi yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	
I.3		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi		
	4	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/Lestari/Sehat/Pintar/Kepemimpinan/Hukum pd LPLPP tingkat provinsi	27 orang
II		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Kebijakan Perlindungan Perempuan Terimplementasi	100 %
II.1		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
	5	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	100 Orang
	6	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan	Jumlah Korban Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	70 layanan

		Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi		
II.2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi			
	7	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	200 Orang
	8	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dok
	9	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan kewenangan Provinsi	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	90 orang
II.3	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
	10	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	2 Dok

		Perempuan Kewenangan Provinsi		
III	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		Persentase layanan kualitas keluarga yang tersedia	% 100
III.1	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi			
	11	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	2 dokumen
IV	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		Persentase data gender tersedia	100 %
IV.1	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi			
	12	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	- Dok
	13	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	2 Dok
V	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		Persentase variabel kluster hak anak terimplementasi	100 %
V.1	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi			

	14	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi	27 Perangkat daerah
V.2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi			
	15	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	300 Orang
	16	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak	1 kegiatan
	17	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	1 dokumen
VI	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Persentase Kebijakan Perlindungan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus terimplementasi	100 %
VI.1	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten Kota			
	18	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap	2 Dok

		Anak Kewenangan Provinsi	Anak Kewenangan Provinsi	
	19	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA Kewenangan Provinsi	Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu Kewenangan Provinsi	0 Kegiatan
VI.2	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi			
	20	Koordinasi Pelaksanaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang mendapatkan layanan Kewenangan Provinsi	150 orang
VI.3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kab Kota			
	21	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK Kewenangan Provinsi	45 orang
	22	Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK Kewenangan Provinsi	Jumlah AMPK yang memperoleh Bantuan Kebutuhan Khusus Kewenangan Provinsi	90 Orang
VII	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			

VII.1	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk			
	23	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA Melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA Melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK	3 laporan
	24	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	1 Dok
	25	Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program bangga Kencana dan Sektor Lain	Jumlah Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Sektor Lain	1 Daerah
VII.2	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi			
	26	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 Dok

VIII	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		100 %
VIII.1	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal		
	27 Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	3 daerah
	28 Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana	Jumlah fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	7 daerah
	29 Pengembangan Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	- dok
	30 Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Laporan Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Sesuai	- laporan

VIII.2	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			
	31	Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	25 Organisasi
IX	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			
IX.1	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			
	32	Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	Jumlah Kelompok Genre yang dibina	3 kelompok
	33	Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	- Laporan
	34	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	- Dok

	35	Advokasi, sosialisasi dan promosi indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) tingkat Provinsi dan kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	2 laporan
IX.2	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			
	36	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	1 dokumen
	37	Fasilitasi kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah fasilitasi pemberdayaan ekonomi keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	-

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas P3AKB Provsu Tahun 2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi

pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan

Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Sumber Data
1	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan berkelanjutan	Indeks pembangunan Gender (IPG)	91,36	91,5	100,1 %	BPS KemenPPPA Data realisasai 2024
2	Meningkatnya kesetaraan gender dan kualitas hidup perempuan	Indeks Ketimpangan gender (IKG)	0,41	0,399	102,7%	
3	Meningkatnya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	63,7	68,66	107,7 %	
4	Meingkatkan kualitas pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pembangunan keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	61,34	62,9	102,45%	BPS Kemenduk- bangga

*data realisasi 2025 diperkirakan rilis di pertengahan tahun 2026

Sumber : Laporan Realisasi Kinerja Dinas P3AKB Provsu Tahun 2025

Capaian IKU pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tahun 2025 masih menggunakan data tahun 2024 dikarenakan data 2025 baru akan dirilis di pertengahan tahun 2026

- **Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan berkelanjutan.**

Capaian **Indeks Pembangunan Gender (IPG)** belum dapat disajikan secara definitif karena data resmi IPG Tahun 2025 masih dalam proses penghitungan dan belum dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Sehubungan dengan hal tersebut, pengukuran kinerja pada indikator IPG Tahun 2025 masih menggunakan **data Tahun 2024** sebagai data terakhir yang tersedia. Capaian untuk indikator IPG tahun 2024 adalah 91,5 dibandingkan dengan target tahun 2025 yaitu 91,36 maka realisasi capaian adalah 100,1%.

Indikator IPG merupakan nilai komposit dari 3 dimensi yaitu, Kesehatan, yang meliputi Umur Harapan Hidup (UHH); Pendidikan, yang meliputi harapan lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS); dan Standar Hidup Layak, yang meliputi Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 dan berkontribusi pada peningkatan dan pencapaian indikator ini adalah:

1. Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan
2. Penyediaan kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus
3. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, program, dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan
4. Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan penanganan perempuan korban kekerasan.
5. Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan

6. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan layanan rujukan lanjutan

Program dan kegiatan tersebut berkontribusi langsung terhadap peningkatan derajat kesehatan dan keselamatan perempuan, khususnya melalui penanganan cepat korban kekerasan, pemulihan fisik dan psikologis, serta pencegahan dampak kesehatan jangka panjang. Upaya pencegahan kekerasan dan penguatan kapasitas kelembagaan menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung keberlanjutan pendidikan perempuan. Melalui layanan rujukan terpadu, jejaring lintas sektor, dan penguatan kelembagaan, perempuan korban kekerasan memperoleh akses terhadap layanan sosial, hukum, kesehatan, dan pemulihan ekonomi. Hal ini mendukung pemulihan produktivitas dan kemandirian ekonomi perempuan, yang secara tidak langsung berkontribusi pada peningkatan standar hidup layak perempuan.

Nilai IPG tersebut menggambarkan bahwa akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi perempuan terus mengalami perbaikan, khususnya pada dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Peningkatan IPG juga mengindikasikan semakin menyempitnya kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan, meskipun masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk mencapai kesetaraan yang optimal.

Capaian IPG tahun 2024 ini menjadi indikator positif keberhasilan sinergi lintas sektor, baik pemerintah daerah, perangkat daerah, maupun pemangku kepentingan lainnya, dalam mendorong kebijakan yang responsif gender. Ke depan, penguatan implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG), peningkatan kualitas data terpilah gender, serta perluasan akses perempuan terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi produktif akan terus menjadi fokus untuk mendorong peningkatan IPG secara berkelanjutan.

- **Meningkatnya kesetaraan gender dan kualitas hidup perempuan**

Capaian **Indeks Ketimpangan Gender (IKG)** belum dapat disajikan secara definitif karena data resmi IKG Tahun 2025 masih dalam proses penghitungan dan belum dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Sehubungan dengan hal tersebut, pengukuran kinerja pada indikator IKG Tahun 2025 masih menggunakan **data Tahun 2024** sebagai data terakhir yang tersedia. Capaian untuk indikator IPG tahun 2024 adalah 0.399 dibandingkan dengan target tahun 2025 yaitu 0,410 maka realisasi capaian adalah 102,7% dimana semakin kecil IKG menunjukkan capaian yang semakin tinggi.

Indikator ini terdiri dari beberapa dimensi diantaranya: Kesehatan Reproduksi yang meliputi Angka kematian Ibu (AKI) dan Angka Kelahiran Remaja (ASFR); Pemberdayaan, yang meliputi Persentase Perempuan di Parlemen serta Persentase Penduduk usia ≥ 25 tahun Berpendidikan SMA ke atas; Pasar Tenaga Kerja yang meliputi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) laki-laki dan perempuan. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 dan berkontribusi pada peningkatan dan pencapaian indikator ini adalah:

1. Koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi
2. Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG kewenangan provinsi
3. Pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan provinsi

Integrasi perspektif gender melalui PUG dan PPRG memastikan kebijakan dan program lintas sektor memperhatikan kebutuhan spesifik perempuan dan remaja perempuan, termasuk akses terhadap layanan kesehatan reproduksi. Sementara itu, pengembangan kegiatan masyarakat dalam peningkatan kualitas

keluarga memperkuat peran keluarga dalam pencegahan perkawinan anak dan kehamilan remaja.

4. Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dalam politik, hukum, sosial, dan ekonomi kewenangan provinsi
5. Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi
6. Penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data provinsi

Kegiatan-kegiatan tersebut berperan dalam memperluas keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai sektor strategis serta meningkatkan efektivitas layanan peningkatan kapasitas dan perlindungan hak perempuan. Dukungan data gender dan anak yang terpilah menjadi dasar perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

7. Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dalam ekonomi kewenangan provinsi
8. Koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi

Kegiatan tersebut mendorong terbukanya akses dan kesempatan kerja yang setara bagi perempuan. PUG memastikan program ketenagakerjaan dan ekonomi daerah mengurangi hambatan struktural berbasis gender

9. Advokasi dan KIE Program KKBPK,
10. Fasilitasi kerja sama dengan stakeholders dan mitra kerja,
11. Penggunaan media massa dan media luar ruang untuk meningkatkan literasi kesehatan reproduksi masyarakat.
12. Pengembangan strategi promosi dan konseling kesehatan reproduksi yang disesuaikan dengan kearifan budaya lokal
13. Sosialisasi dan pembinaan remaja melalui Program Generasi Berencana (GenRe) serta pembinaan ketahanan keluarga dan remaja

14. Fasilitasi dan penguatan penyiapan pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK),
15. Pengelolaan ketahanan keluarga melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)
16. Pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga—termasuk advokasi, sosialisasi, dan promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)
17. Fasilitasi pemberdayaan ekonomi keluarga

Kegiatan-kegiatan tersebut berperan strategis dalam mendukung dimensi kesehatan reproduksi dengan mendorong peningkatan pengetahuan dan kesadaran pasangan usia subur dan remaja terkait perencanaan kehamilan, pencegahan kehamilan berisiko, serta pemanfaatan layanan kesehatan reproduksi.

Penurunan nilai IKG mencerminkan hasil positif dari berbagai kebijakan dan program yang berfokus pada peningkatan kesehatan reproduksi, pemberdayaan perempuan, serta partisipasi perempuan dalam bidang pendidikan dan ekonomi. Capaian ini menegaskan bahwa upaya pengarusutamaan gender yang dilaksanakan secara berkelanjutan mulai memberikan dampak nyata dalam mengurangi kesenjangan gender.

Ke depan, diperlukan penguatan sinergi lintas sektor serta peningkatan kualitas intervensi yang responsif gender untuk menjaga tren penurunan IKG dan mendorong terciptanya pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan di Provinsi Sumatera Utara.

- **Meningkatnya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak**

Capaian **Indeks Perlindungan Anak (IPA)** belum dapat disajikan secara definitif karena data resmi IPA Tahun 2025 masih dalam proses penghitungan dan belum dirilis oleh KemenPPPA. Sehubungan dengan hal tersebut, pengukuran kinerja pada

indikator IPA Tahun 2025 masih menggunakan **data Tahun 2024** sebagai data terakhir yang tersedia. Capaian untuk indikator IPA tahun 2024 adalah 68,66 dibandingkan dengan target tahun 2025 yaitu 63,7. maka realisasi capaian adalah 107,7%.

Indikator IPA merupakan nilai komposit dari dimensi yaitu, Hak Sipil dan Kebebasan; Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya; Perlindungan Khusus Anak. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 dan berkontribusi pada peningkatan dan pencapaian indikator ini adalah:

1. Pengembangan komunikasi, informasi, dan edukasi pemenuhan hak anak
2. Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media, dan dunia usaha kewenangan provinsi
3. Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media, dan dunia usaha kewenangan provinsi
4. Pengembangan komunikasi, informasi, dan edukasi pemenuhan hak anak
5. Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak, Kecamatan Layak Anak, Desa/Kelurahan Layak Anak, dan DRPPA kewenangan provinsi
6. Penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi
7. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi
8. Pengembangan komunikasi, informasi, dan edukasi pemenuhan hak anak

9. Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media, dan dunia usaha kewenangan provinsi.

Kegiatan-kegiatan tersebut mendorong terciptanya lingkungan yang mendukung akses anak terhadap hak anak terkait hak sipil dan kebebasan serta membangun pemahaman dan komitmen bersama dalam pemenuhan hak anak di lingkungan keluarga dan masyarakat. Sinergi lintas perangkat daerah melalui pengembangan KLA hingga tingkat desa/kelurahan memperkuat sistem pengasuhan yang aman, mendukung, dan berkelanjutan, Penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak yang terkoordinasi secara lintas sektor mendukung pemenuhan kebutuhan dasar anak, termasuk kesehatan, gizi, dan kesejahteraan.

10. Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan provinsi
11. Koordinasi pelaksanaan layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK) kewenangan provinsi
12. Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK kewenangan provinsi
13. Penyediaan bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK kewenangan provinsi.

Upaya pencegahan kekerasan terhadap anak yang terkoordinasi serta penguatan kapasitas SDM layanan perlindungan anak memastikan penanganan AMPK dilakukan secara cepat, terpadu, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak.

Peningkatan nilai IPA ini tidak terlepas dari penguatan kebijakan, program, dan koordinasi lintas sektor dalam pencegahan dan penanganan permasalahan anak, termasuk peningkatan layanan perlindungan khusus anak, pemenuhan hak sipil, serta upaya menciptakan lingkungan yang ramah anak. Capaian tersebut

menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong sistem perlindungan anak yang lebih terintegrasi.

Ke depan, peningkatan kapasitas kelembagaan, kualitas sumber daya manusia layanan perlindungan anak, serta penguatan kolaborasi dengan pemangku kepentingan akan terus menjadi fokus untuk mendorong peningkatan IPA secara berkelanjutan di Provinsi Sumatera Utara.

- **Meingkatkan kualitas pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pembangunan keluarga**

Pada tahun 2025, capaian indikator Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Provinsi Sumatera Utara adalah 62,9; angka ini mengalami peningkatan dibandingkan capaian tahun 2024 yaitu 60,2. Dibandingkan dengan target tahun 2025 yaitu 61,34; maka realisasi capaian tahun 2025 tercapai sebesar 102,45% atau diatas target yang ditetapkan.

Indikator iBangga merupakan nilai komposit dari 3 dimensi yaitu ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 dan berkontribusi pada peningkatan dan pencapaian indikator ini adalah:

1. Implementasi pendidikan kependudukan jalur formal, nonformal, dan informal melalui SSK dan Pojok Kependudukan
2. Penyusunan dan pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) tingkat provinsi
3. Advokasi dan sosialisasi pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB
4. Penyusunan profil program Bangga Kencana
5. Sosialisasi dan pembinaan remaja tentang Generasi Berencana
6. Pembinaan peningkatan akses dan kualitas ketahanan keluarga dan remaja

7. Pelaksanaan fasilitasi, pembimbingan, pengembangan, dan penguatan penyiapan pengasuhan 1000 HPK
8. Pengelolaan ketahanan keluarga melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)
9. Fasilitasi kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
10. Pengembangan dan penguatan jejaring kemitraan dalam Program Bangga Kencana
11. Fasilitasi kerja sama dengan stakeholders dan mitra Pelaksanaan advokasi dan KIE Program KKBPK melalui mitra kerja
12. Pengembangan strategi operasional promosi dan konseling kesehatan reproduksi sesuai kearifan budaya lokal
13. Penggunaan media massa cetak, elektronik, dan media luar ruang untuk advokasi, promosi, dan KIE Program Bangga Kencana
14. Advokasi, sosialisasi, dan promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) tingkat provinsi dan kabupaten/kota

Nilai iBangga tersebut menggambarkan hasil dari berbagai program pembangunan keluarga, khususnya dalam peningkatan kualitas pengasuhan, kesehatan keluarga, pendidikan, serta penguatan fungsi keluarga. Capaian ini juga menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong keluarga yang berkualitas melalui intervensi yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Ke depan, peningkatan efektivitas program pembangunan keluarga, penguatan koordinasi lintas sektor, serta peningkatan peran keluarga dalam pengasuhan dan perlindungan anggota keluarga akan terus menjadi fokus untuk mendorong peningkatan nilai iBangga di Provinsi Sumatera Utara secara berkelanjutan.

3.2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan capaian kinerja Tahun 2025 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2023 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3. 2 Perbandingan Capaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator	2023	2024	2025		
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan berkelanjutan	Indeks pembangunan Gender (IPG)	91,31	91,5	91,36	91,5 (merupakan realisasi tahun 2024 dikarenakan realisasi 2025 belum dirilis oleh BPS)	100,1 %
2	Meningkatnya kesetaraan gender dan kualitas hidup perempuan	Indeks Ketimpangan gender (IKG)	0,43	0,399	0,41	0,399 (merupakan realisasi tahun 2024 dikarenakan realisasi 2025 belum dirilis oleh BPS)	102,7%
3	Meningkatnya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	61,64	68,66	63,7	68,66 (merupakan realisasi tahun 2024 dikarenakan realisasi 2025 belum dirilis oleh kemenPPA)	107,7 %
4	Meningkatnya kualitas pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pembangunan keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	59,65	60,2	61,34	62,9	102,45 %

Sumber : Laporan Realisasi Kinerja Dinas P3AKB Provsu Tahun 2022-2025

Capaian sasaran strategis Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan berkelanjutan, dengan indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2024 sebesar **91,50**, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 yang sebesar **91,31**. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kesetaraan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki di Provinsi Sumatera Utara. Meskipun

capaian tersebut masih sedikit di bawah capaian nasional tahun 2024 sebesar **91,85**, tren peningkatan ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender.

Capaian sasaran strategis Meningkatnya kesetaraan gender dan kualitas hidup perempuan dengan indikator Indeks Ketimpangan Gender (IKG) pada tahun 2024 tercatat sebesar 0,399, menurun dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 0,430. Penurunan nilai IKG mengindikasikan semakin berkurangnya ketimpangan gender di bidang kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan ketenagakerjaan. Capaian ini lebih baik dibandingkan capaian nasional tahun 2024 sebesar 0,421, yang menunjukkan keberhasilan intervensi kebijakan dan program pengarusutamaan gender di daerah.

Capaian sasaran strategis Meningkatnya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus dengan indikator Indeks Perlindungan Anak (IPA) tahun 2024 mencapai 68,66, meningkat signifikan dari capaian tahun 2023 sebesar 61,64. Peningkatan ini mencerminkan penguatan penyelenggaraan perlindungan anak melalui peningkatan layanan, penguatan kelembagaan, serta sinergi lintas sektor dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak. Meskipun capaian tersebut masih berada di bawah capaian nasional tahun 2024 sebesar 71,02, namun menunjukkan kemajuan yang berarti dan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan perlindungan anak yang berkelanjutan.

Capaian sasaran strategis Meningkatkan kualitas pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pembangunan keluarga indikator Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Provinsi Sumatera Utara mencapai **62,9** meningkat dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar **60,20**. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas pembangunan keluarga yang mencakup aspek ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga. Capaian tersebut mencerminkan peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara dalam memperkuat fungsi

keluarga melalui pelaksanaan program pembangunan keluarga, peningkatan kualitas pengasuhan, serta pemberdayaan keluarga sebagai unit dasar pembangunan sumber daya manusia. Meskipun capaian iBangga Provinsi Sumatera Utara tahun 2025 masih berada di bawah capaian nasional sebesar **67,3**, tren peningkatan yang terjadi menunjukkan bahwa arah kebijakan dan program yang dilaksanakan telah berjalan secara positif. Ke depan, diperlukan penguatan sinergi lintas sektor dan peningkatan efektivitas program pembangunan keluarga guna mempercepat peningkatan capaian iBangga dan mendekati capaian nasional.

3.3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara periode 2025-2029 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3. 3 kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator	Base-line 2024	Target 2025	Realisasi Tahun 2025	Target 2026	Target 2027	Target Akhir Rencana Strategis (2030)	Tingkat Kemajuan
-1	-2	-3		-4	-5	-6	-7	-8	(6) =5/8*100
1	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan berkelanjutan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,5	91,36	91,5	92,01	92,27	92,98	98,4%
2	Meningkatnya kesetaraan	Indeks Ketimpangan gender (IKG)	0,399	0,41	0,399	0,390	0,386	0,373	93,48%

	gender dan kualitas hidup perempuan								
3	Meningkatnya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	61,64	63,7	68,66	64,9	66,2	70,7	97,11%
4	Meingkatkan kualitas pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pembangunan keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	59,65	61,34	62,9	62,49	63,66	67,32	93%

*Realisasi tahun 2025 pada indikator IPG, IKG dan IPA menggunakan data terakhir tahun 2024 dikarenakan realisasi 2025 belum dirilis oleh BPS/ kemenPPA

Sumber : Laporan Realisasi Kinerja Dinas P3AKB Provsu Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 3.3, capaian kinerja sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Seluruh indikator sasaran strategis berada pada kategori kemajuan tinggi, dengan tingkat kemajuan berkisar antara **93,00** persen hingga **98,40** persen terhadap target akhir Rencana Strategis Tahun 2030.

Indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebagai ukuran partisipasi perempuan dalam pembangunan berkelanjutan mencapai nilai **91,5**, dengan tingkat kemajuan **98,4** persen, menunjukkan tren peningkatan yang konsisten menuju target akhir Renstra. Selanjutnya, indikator Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terealisasi sebesar **0,399**, lebih baik dari target tahun berjalan, dengan tingkat kemajuan **93,48** persen, yang mencerminkan semakin menurunnya ketimpangan gender di Provinsi Sumatera Utara.

Pada sasaran meningkatnya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus, indikator Indeks Perlindungan Anak (IPA)

mencapai **68,66**, melampaui target tahun 2025, dengan tingkat kemajuan **97,11** persen. Capaian ini menunjukkan adanya penguatan komitmen dan sinergi lintas sektor dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak. Sementara itu, indikator Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) terealisasi sebesar **62,9**, dengan tingkat kemajuan **93** persen, yang menandakan peningkatan kualitas pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, capaian indikator sasaran strategis Tahun 2025 menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan Dinas P3AKB Provinsi Sumatera Utara telah berjalan efektif dan on track menuju pencapaian target akhir Rencana Strategis Tahun 2030, meskipun tetap diperlukan upaya penguatan keberlanjutan program dan peningkatan kolaborasi lintas perangkat daerah untuk menjaga tren kinerja positif tersebut.

3.4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025 (realisasi 2024 karena 2025 belum release)	Standar Nasional
1	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan berkelanjutan	Indeks pembangunan Gender (IPG)	91,5	91,85
2	Meningkatnya kesetaraan gender dan kualitas hidup perempuan	Indeks Ketimpangan gender (IKG)	0,399	0,421

3	Meningkatnya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	68,66	71,02
4	Meingkatkan kualitas pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pembangunan keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	62,9	67,3

3.5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1) Sasaran Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan berkelanjutan.

• Indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Capaian **Indeks Pembangunan Gender (IPG)** sebesar 91,50, menunjukkan adanya peningkatan kualitas pembangunan manusia yang semakin setara antara laki-laki dan perempuan, sekaligus mencerminkan hasil dari berbagai kebijakan dan program yang berorientasi pada pengarusutamaan gender di berbagai sektor pembangunan.

Faktor Pendukung

Adapun faktor-faktor yang mendukung tercapainya target indikator ini antara lain

- a. Keberlanjutan kerangka kebijakan perlindungan perempuan dan anak, termasuk keberadaan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO, Pokja AMPK, serta berbagai regulasi terkait perlindungan perempuan diantaranya :
 - Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 1 tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 54 tahun 2010 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Sumatera Utara
 - Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/261/KPTS/2025 tanggal 26 Maret 2025 tentang

Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO Provinsi Sumatera Utara.

Kebijakan tersebut menjadi landasan bagi penguatan layanan pengaduan, penyediaan kebutuhan spesifik perempuan dalam kondisi darurat, serta penanganan korban kekerasan yang berdampak langsung pada peningkatan kesehatan dan keselamatan perempuan.

- b. Komitmen dan koordinasi lintas stakeholder—meliputi perangkat daerah, instansi vertikal, akademisi, lembaga masyarakat, dunia usaha, dan media—yang telah dibangun sejak tahun sebelumnya terus berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi perempuan. Koordinasi lintas stakeholder yang telah dibuat diantaranya:
 - Nota Kesepahaman (MoU) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara dengan RS Bhayangkara TK II Medan tentang Penguatan layanan Visum Et Repertum ramah Korban serta Perlindungan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
 - Nota Kesepahaman (MoU) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara dengan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I dan Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (Kopertais) Wilayah IX Sumatera Utara, tentang Pencegahan kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.
- c. Keberadaan unit layanan perlindungan perempuan dan anak di kabupaten/kota, didukung oleh SDM layanan serta sistem pencatatan dan pelaporan kasus kekerasan yang terintegrasi, memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kekerasan. Saat ini 30 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara telah membentuk UPTD PPA.

Faktor Penghambat

Adapun faktor yang dapat menghambat pencapaian target, antara lain:

- a. Koordinasi lintas sektor dalam perlindungan perempuan korban kekerasan belum sepenuhnya optimal, terutama dalam penyediaan layanan lanjutan yang terpadu.
- b. Keterbatasan SDM spesifik di unit layanan—seperti psikolog, tenaga kesehatan, dan tenaga ahli hukum—masih menjadi kendala dalam memberikan layanan yang komprehensif dan berkelanjutan.
- c. Stigma sosial dan budaya menyebabkan masih adanya perempuan yang enggan melaporkan kasus kekerasan, sehingga potensi dampak kekerasan terhadap kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan ekonomi perempuan belum sepenuhnya tertangani.

Alternatif solusi

Sebagai tindak lanjut atas tantangan yang berulang dari tahun sebelumnya, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) Provinsi Sumatera Utara akan melakukan upaya peningkatan IPG diantaranya melalui :

- **Penguatan advokasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak** kepada seluruh pemangku kepentingan guna memastikan komitmen yang berkelanjutan.
- **Peningkatan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor**, khususnya dalam pencegahan kekerasan dan pelaksanaan layanan rujukan lanjutan yang terpadu.
- **Peningkatan kapasitas SDM di unit layanan perlindungan perempuan dan anak** menjadi prioritas agar layanan yang diberikan semakin komprehensif, mencakup aspek kesehatan fisik dan psikologis, pendidikan, hukum,

serta pemulihan ekonomi.

- **Memperkuat Upaya pencegahan dan penanganan kekerasan melalui pemanfaatan media elektronik, media daring, dan media cetak** untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mengurangi stigma terhadap korban.

2) Sasaran Meningkatnya Kesenjangan Gender dan Kualitas Hidup Perempuan

• Indikator Indeks Kesenjangan Gender (IKG)

Capaian **Indeks Kesenjangan Gender (IKG)** sebesar 0,399 menunjukkan adanya penurunan tingkat kesenjangan gender, yang mengindikasikan semakin membaiknya kesetaraan peran dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan

Faktor Pendukung

Adapun faktor-faktor yang mendukung tercapainya target indikator ini antara lain:

- a. Tersedianya kerangka kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) yang menjadi acuan integrasi perspektif gender dalam perencanaan dan pelaksanaan program lintas sektor.
- b. Implementasi Program Bangga Kencana, GenRe, 1000 HPK, PPKS, serta pengembangan kegiatan masyarakat dalam peningkatan kualitas keluarga turut memperkuat akses layanan kesehatan reproduksi, pemberdayaan perempuan, dan ketahanan keluarga.
- c. Dukungan jejaring kemitraan dengan OPD terkait, mitra kerja, media massa, dan organisasi masyarakat berperan dalam memperluas jangkauan advokasi, promosi, dan KIE yang berperspektif gender.

Faktor Penghambat

Adapun faktor yang dapat menghambat pencapaian target, antara lain:

- a. Belum optimalnya pengintegrasian isu-isu gender dalam proses pembangunan (perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pelaporan) di seluruh perangkat daerah maupun kabupaten kota se Sumatera Utara.
- b. Norma sosial dan budaya yang masih membatasi peran perempuan, termasuk toleransi terhadap perkawinan anak dan rendahnya keterlibatan laki-laki dalam isu kesehatan reproduksi dan keluarga, turut mempengaruhi efektivitas program.
- c. Keterbatasan literasi gender dan kesehatan reproduksi, kesenjangan akses dan kualitas layanan, serta belum optimalnya penyajian maupun pemanfaatan data terpilah gender sehingga program yang disusun dan dievaluasi oleh masing-masing perangkat daerah belum sepenuhnya memanfaatkan data terpilah gender.

Alternatif Solusi

Dengan berbagai tantangan tersebut maka perlu dilakukan upaya perbaikan melalui :

- **Penguatan implementasi PUG dan PPRG secara konsisten pada seluruh OPD**, disertai peningkatan koordinasi lintas sektor dan lintas mitra dalam mendukung isu kesetaraan gender.
- **Mengembangkan strategi advokasi, promosi, dan KIE** dengan pendekatan kearifan lokal serta melibatkan tokoh masyarakat dan keluarga untuk meningkatkan penerimaan sosial.

- **Memperluas akses dan peningkatan kualitas layanan kesehatan** reproduksi, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi perempuan perlu diintegrasikan dengan penguatan ketahanan keluarga.
- **Optimalisasi penggunaan data terpilah gender dan usia** untuk memastikan perencanaan dan evaluasi program yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

3) Sasaran Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak

- **Indikator Indeks Perlindungan Anak (IPA)**

Capaian Indeks Perlindungan Anak (IPA) sebesar 68,66 menunjukkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perlindungan anak, yang mencerminkan semakin baiknya pemenuhan hak dan perlindungan anak di berbagai aspek pembangunan.

Faktor Pendukung

Adapun faktor-faktor yang mendukung tercapainya target indikator ini antara lain:

- a. Keberlanjutan pelebagaan Pemenuhan Hak Anak (PHA) melalui koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor, advokasi kebijakan, serta penguatan komunikasi, informasi, dan edukasi publik.
- b. Berbagai kegiatan advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media, dan dunia usaha.
- c. Penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak yang terkoordinasi secara lintas sektor
- d. Terlaksananya penguatan kerja sama lintas perangkat daerah dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) kecamatan dan desa/kelurahan,

- e. Adanya penguatan DRPPA/RBI, yang memperkuat sistem perlindungan dan pengasuhan anak yang berkelanjutan.
- f. Di sisi perlindungan khusus, Adanya koordinasi pencegahan kekerasan terhadap anak, dan layanan terpadu bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK), serta penyediaan bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK
- g. Dukungan kebijakan perlindungan perempuan dan anak, keberadaan gugus tugas dan pokja terkait, unit layanan di kabupaten/kota, serta sistem pencatatan dan pelaporan kasus kekerasan yang terintegrasi.

Faktor Penghambat

Adapun faktor yang dapat menghambat pencapaian target, antara lain:

- a. Komitmen pemerintah daerah di berbagai tingkatan, mulai dari desa/kelurahan hingga kabupaten/kota, dalam percepatan pengembangan KLA belum sepenuhnya optimal, yang tercermin dari masih terbatasnya kebijakan dan dukungan anggaran yang secara spesifik berorientasi pada anak.
- b. Peran Gugus Tugas KLA di berbagai tingkatan belum berjalan secara maksimal, sehingga koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak belum sepenuhnya efektif.
- c. Keterbatasan SDM layanan perlindungan anak, khususnya tenaga psikolog, tenaga kesehatan, dan tenaga ahli hukum, serta stigma sosial yang menyebabkan masih rendahnya pelaporan kasus kekerasan terhadap anak.

Alternatif Solusi

Dengan berbagai tantangan tersebut maka perlu dilakukan upaya perbaikan melalui :

- **Penguatan jaminan kebijakan dan regulasi** melalui penyusunan dan implementasi peraturan daerah, rencana aksi daerah, dan pedoman teknis yang menjadi peta jalan percepatan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) menuju Provinsi Layak Anak (PROVILA).
- **Pendekatan kolaboratif dan intersektoral** yang melibatkan pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, lembaga masyarakat, dan media.
- **Peningkatan kapasitas SDM terlatih Konvensi Hak Anak (KHA)**, khususnya Gugus Tugas KLA dan penyedia layanan perlindungan anak.
- **Peningkatan pemanfaatan media elektronik, media daring, dan media cetak** untuk meningkatkan kesadaran publik dan mengurangi stigma.

4) Sasaran Meningkatnya kualitas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

• Indikator Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)

Capaian IKU pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana tahun 2025 dengan indikator Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Provinsi Sumatera Utara mencapai 62,9 Capaian ini menunjukkan adanya kemajuan dalam kualitas pembangunan keluarga, yang tercermin dari penguatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagai unit dasar pembangunan.

Faktor Pendukung

Adapun faktor-faktor yang mendukung tercapainya target indikator ini antara lain:

- a. Meningkatnya capaian penggunaan kontrasepsi modren (*CPR/Contraceptive Prevalence Rate*) pada PUS mencapai 50,5persen tahun 2025; begitu juga penggunaan Metode

Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) mencapai mencapai 41,3 persen tahun 2025.

- b. Meningkatnya Median Usia Kawin pada perempuan mencapai tahun pada tahun 22,3 tahun pada 2025.
- c. Kolaborasi dan kemitraan dengan stakeholders, organisasi kemasyarakatan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan berwawasan kependudukan.

Faktor Penghambat

Adapun faktor yang dapat menghambat pencapaian target, antara lain:

- a. Budaya patrialistik dan persepsi masyarakat atas kehadiran anak laki-laki sebagai penerus keluarga, menjadi tantangan dalam mencapai penduduk tumbuh seimbang dengan nilai TFR 2,1, dan
- b. Aksesibilitas dan keterjangkauan terhadap pelayanan Keluarga Berencana menjadi tantangan masih tingginya angka putus pakai kontrasepsi yang masih mencapai 26,4 persen tahun 2025.

Alternatif Solusi

Dengan berbagai tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) Provinsi Sumatera Utara, akan terus berupaya untuk mencapai pertumbuhan penduduk seimbang dengan memperkuat koordinasi dan sinergi program/kegiatan lintas sektor pada dimensi kependudukan seperti :

- **Pengendalian Angka Kelahiran (Fertilitas)**, melalui optimalisasi kepedulian terhadap Isu-isu Kependudukan terutama di kalangan remaja melalui melaksanakan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) dan Generasi Berencana (Genre);

untuk membangun pemahaman tentang pentingnya pengendalian penduduk.

- **Peningkatan pelaksanaan kebijakan pengendalian penduduk** dalam melaksanakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan, melalui pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan dan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Tahun 2025 – 2029 dari Tingkat Provinsi dan Kab/Kota.
- **Penguatan kolaborasi dan kemitraan organisasi kemasyarakatan, profesi dan keagamaan** dalam pelaksanaan Program bangga Kencana melalui kegiatan advokasi dan KIE serta desiminasi informasi tentang Program Bangga Kencana

3.6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3. 4 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi	Persen- tase Efisiensi
			Targ et	Realisa si	Capai- an	Target	Realisasi	Capai- an		
1	Meningkatnya implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan dan Penganggaran bagi Perangkat Daerah	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	28%	54,7%	195,3 %	174.494.000	147.069.000	84,28 %	354.899.000	67,04%
2	Meningkatnya layanan dan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak yang mengalami kekerasan	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	11,4	11,21	98%	517.681.520	453.574.741	87,62 %	139.421.800	21,22%
		Rasio Kekerasan Terhadap Anak	2,8	2,66	95%	202.903.750	148.805.150	73,34 %	44.626.300	0,00%
3	Meningkatnya Implementasi Kabupaten/Kota Menuju Layak Anak	Persentase Perangkat Daerah Berkontribusi Mewujudkan Kab/Kota (menuju) Layak Anak	86%	80%	93%	152.557.000	150.199.438	98,45 %	371.711.000	70,90%
4	Menurunnya Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	TFR/Total Fertility Rate (Angka Kelahiran Total)	2,42	2,36	102,5 %	115.755.700	115.305.700	99,61 %	250.011.000	68,35%

Sumber : Laporan Realisasi Kinerja Dinas P3AKB Provsu Tahun 2024

3. 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel dibawah ini:

Tabel 3. 5 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian	Menunggu / Tidak Menunggu	Analisis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan dan Penganggaran bagi Perangkat Daerah	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		100%		
				Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi		19%		
				Penyusunan kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi	1 kebijakan	menunggu	Penyusunan dokumen Rencana Aksi Implementasi PUG di Provinsi Sumatera Utara masih dalam tahapan draft sehingga akan dikuatkan dengan upaya optimalisasi koordinasi dengan melibatkan seluruh perangkat daerah dan stakeholder terkait dalam

							penyusunan Rencana Aksi PUG Sumatera Utara	
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	42 perangkat daerah	menunjang	Masih muncul kendala terkait dengan teknis penyusunan dokumen PPRG sehingga memerlukan penguatan fungsi Kelompok Kerja PUG yang di tingkat Provinsi
				Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi		36%		

			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mengikuti Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	25 lembaga	menunja ng	Belum optimalnya pelaksanaan penguatan perempuan dalam bidang politik melalui pelaksanaan kegiatan penguatan politik bagi perempuan
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi		49%		
			Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/Lestari /Sehat/Pintar/Kepemimpinan/H	20 orang	menunja ng	Belum optimalnya penyusunan strategi pelaksanaan kegiatan berbasis data sehingga disusun database bagi lembaga-lembaga yang menyediakan layanan Pemberdayaan Perempuan di Sumut

					ukum pd LPLPP tingkat provinsi			
2	Meningkatn ya layanan dan upaya perlindunga n terhadap perempuan dan anak yang mengalami kekerasan	Rasio Kekerasan Terhadap Perempua n		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Kebijakan Perlindungan Perempuan Terimplementas i	100%		
				Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah KabupatenKota		77%		
				Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan	350 orang	menunja ng	Belum terbangunnya layanan berbasis aplikasi online sehingga akan disusun rencana pembuatan layanan pengaduan berbasis aplikasi online

			Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Layanan Pengaduan Masyarakat			
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Korban Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	70 layanan	menunjang	Belum ada intervensi pencegahan berbasis data pemetaan melalui upaya pemetaan intervensi kekerasan berbasis data
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi		40%		
			Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi yang Mendapatkan	250 orang	menunjang	Belum optimalnya distribusi kebutuhan spesifik kepada perempuan dalam kondisi darurat dan kondisi khusus akan dioptimalkan melalui alokasi anggaran yang memadai

				Kewenangan Provinsi	Pemenuhan Kebutuhan Spesifik			
				Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	- dok	menunja ng	Jejaring lembaga penyedia layanan perlindungan Perempuan masih belum tersebar ke 33 kab/kota dan akan dioptimalkan melalui koordinasi antar provinsi dan kab/kota
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan kewenangan Provinsi	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	20 orang	menunja ng	Kegiatan belum menyentuh keseluruhan kab/kota sehingga akan disusun peta potensi

			Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		81%		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	1 dok	menunja ng	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan masih belum menyentuh pada basis kekerasan terhadap perempuan, sehingga memerlukan pemetaan basis kekerasan yang disusun secara sistematis
		Rasio Kekerasan Terhadap Anak	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		91%		
			Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak		93%		

				Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten Kota				
				Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Kebijakan/Program/Kegiatan Pencegahan KTA Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Kewenangan Provinsi	- Orang	menunjang	Belum tersedianya data yang akurat terkait dengan anak dalam kondisi khusus sehingga akan disusun databased AMPK Sumut, melalui optimalisasi koordinasi lintas sektor
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	1 dok	menunjang	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap anak masih belum menyentuh pada basis kekerasan terhadap perempuan, sehingga memerlukan pemetaan basis kekerasan yang disusun secara sistematis

			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kab Kota		89%		
			Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	-dok	menunja ng	Belum optimalnya kampanye AMPK ke Kab/Kota Akan disusun rencana kegiatan yang lebih efisien
			Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK Kewenangan Provinsi	- kegiatan	menunja ng	Terjadinya rotasi perubahan SDM pengampu kegiatan di Lembaga Penyedia Layanan sehingga akan disusun buku pintar bagi Lembaga Penyedia Layanan AMPK

			Kewenangan Provinsi				
			Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	4 dok	menunja ng	Belum ada intervensi pencegahan berbasis data pemetaan Akan disusun pemetaan intervensi kekerasan berbasis data
			Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi		91%		

				Koordinasi Pelaksanaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang mendapatkan layanan Kewenangan Provinsi	200 orang	menunjang	Masih terbatasnya layanan yang diberikan kepada anak yang memerlukan perlindungan khusus, sehingga akan dioptimalkan dengan penguatan koordinasi dalam pemberian layanan bagi AMPK yang memerlukan peran berbagai pihak
3	Meningkatnya Implementasi Kabupaten/Kota Menuju Layak Anak	Persentase Perangkat Daerah Berkontribusi Mewujudkan Kab/Kota (menuju) Layak Anak	100%	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		100%		
				Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi		95%		

			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi	24 perangkat daerah	menunjang	1. Belum tersusunnya Rencana Aksi Daerah KLA yang akan menjadi peta jalan perwujudan Provinsi Layak Anak di Sumatera Utara. 2. Belum optimalnya tugas, fungsi dan peran Gugus Tugas Kab./Kota Layak Anak Provinsi Sumatera Utara.
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi		84%		
			Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	350 Orang	menunjang	Belum tersedianya layanan terpadu untuk peningkatan kualitas hidup anak yang akan diintervensi dengan pelaksanaan kegiatan terintegrasi dan terpadu untuk penyediaan dan peningkatan kualitas hidup anak

				Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	1 kegiatan	menunja ng	Belum tersusunnya data base penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak menyebabkan upaya peningkatan kualitas hidup anak belum dapat dilaksanakan secara komprehensif, sehingga diperlukan databased terkait dengan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak di 33 kabupaten/kota
4	Menurunnya Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	TFR/Total Fertility Rate (Angka Kelahiran Total)	84%	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		100%		
				Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		60%		

6			Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA Melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA Melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK	3 laporan	menunjang	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPk) berjalan dengan baik
			Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	1 dok	menunjang	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi dapat dilaksanakan dengan optimal
			Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program	Jumlah Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi	3 daerah	menunjang	Anggaran untuk melakukan pembinaan, peningkatan dan pengembangan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB sangat terbatas sehingga memerlukan peningkatan alokasi anggaran yang

				KKBPK dan Sektor Lain	Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Sektor Lain			dilaksanakan melalui pengusulan peningkatan anggaran
				Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi		40%		
				Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 dok	menunja ng	Pemetaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dapat dilaksanakan secara optimal
				PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA				

				BERENCANA (KB)				
				Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal				
				Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	4 dokumen		1. Strategi kemitraan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam Program KB belum optimal sehingga perlu upaya pada peningkatan kolaborasi program kerja dengan mitra dan sektor terkait
				Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana	Jumlah fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program	2 dokumen	menunjang	2. Penyelenggaraan Advokasi dan KIE perlu di tingkatkan melalui peningkatan kegiatan advokasi dan KIE 3. Anggaran untuk melakukan pembinaan,

				Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)			peningkatan dan pengembangan strategi penyelenggaraan Program KB sangat terbatas melalui optimalisasi monitoring dan evaluasi akses dan kualitas pelayanan KB yang merata bagi masyarakat serta menyusun usulan kegiatan yang menjangkau sasaran khusus seperti: keluarga berisiko stunting dan PUS muda.
			Pengembangan Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	3 dok		
			Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Sesuai	Jumlah Laporan Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan	3 laporan		

				Kearifan Budaya Lokal	Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Sesuai		
				Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			
				Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana	2 Organisasi	menunjang

	(Bangga Kencana)			
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				
Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				
Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	Jumlah Kelompok Genre yang dibina	- kelompok	menunjang	Belum semua Kab/Kota dapat di jangkau sebagai target sehingga perlu dilakukan penambahan Target Kab/Kota
Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	- laporan		

Pelaksanaan Fasilitas, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	- dokumen		
Penyediaan Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Jumlah Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	- unit		
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				

				Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	3 dokumen		
				Fasilitasi kegiatan pemberdayaanEkonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Promosi tentang pemberdayaan ekonomi keluarga dan pengelolaan keuangan keluarga	2 laporan		

B. Realisasi Anggaran

Dalam realisasi anggaran memuat penjelasan terkait anggaran yang digunakan serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3. 6 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
I	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		174.494.000	147.069.000	84%
I.1	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi		116.613.000	94.138.000	81%
1	Penyusunan kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi	84.635.000	63.818.000,00	75%
2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	31.978.000	30.320.000	95%
I.2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi		44.381.000	39.431.000	89%
3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mengikuti Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi	44.381.000	39.431.000	89%

		Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi			
I.3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi		13.500.000	13.500.000	100%
4	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/ Lestari / Sehat/ Pintar/ Kepemimpinan/ Hukum pd LPLPP tingkat provinsi	13.500.000	13.500.000	100%
II	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		517.681.520	453.574.741	87%
II.1	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		325.814.520	271.668.491	77%
5	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	208.074.520	199.779.491	96%

6	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Korban Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	117.740.000	71.889.000	61%
II.2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi		141.019.500	131.813.250	88%
7	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	106.510.750	103.751.250	97%
8	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/	0	0	93%
9	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan kewenangan Provinsi	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	34.508.750	28.062.000	81%

II.3	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		50.847.500	50.093.000	98%
10	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	50.847.500	50.093.000	98%
III	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		84.952.506	57.682.550	68%
III.1	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi		84.952.506	57.682.550	68%
11	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	84.952.506	57.682.550	68%
IV	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		0	0	0%

IV.1	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi		0	0	0%
12	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	0	0	0%
V	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		152.557.000	150.199.438	98%
V.1	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi		1.792.000	1.792.000	100%
13	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi	1.792.000	1.792.000	100%
V.2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi		150.765.000	148.407.438	98%
14	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	140.629.000	139.490.000	99%

15	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	10.136.000	8.917.438	87%
VI	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		202.903.750	148.805.150	91%
VI.1	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten Kota		50.655.000	50.655.000	100%
16	Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Kebijakan/Program/ Kegiatan Pencegahan KTA Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Kewenangan Provinsi	50.655.000	50.655.000	100%
17	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	0	0	0%
VI.2	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi		117.740.000	70.081.150	60%

18	Koordinasi Pelaksanaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang mendapatkan layanan Kewenangan Provinsi	117.740.000	70.081.150	60%
VI.3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kab Kota		34.508.750	28.069.000	81%
19	Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Perlindungan Khusus Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi	0	0	0%
20	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK Kewenangan Provinsi	0	0	0
21	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK Kewenangan Provinsi	34.508.750	28.069.000	81%
VII	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		115.755.700	115.305.700	98%

VII.1	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		86.861.000	86.411.000	99%
22	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA Melalui Sekolah Siaga Kependudukan/ SSK dan Pojok Kependudukan/ PJK	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA Melalui Sekolah Siaga Kependudukan/ SSK dan Pojok Kependudukan/ PJK	20.760.000	20.310.000	98%
23	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	11.000.000	11.000.000	100%
24	Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK dan Sektor Lain	Jumlah Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Sektor Lain Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Sektor Lain	55.101.000	55.101.000	100%

VII.2	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi		28.894.700	28.894.700	100%
25	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	28.894.700	28.894.700	100%
VIII	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		35.415.000	35.415.000	89%
VIII.1	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal		35.415.000	35.415.000	100%
26	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	35.415.000	35.415.000	100%
27	Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana	Jumlah fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	0	0	0%

28	Pengembangan Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	0	0	0%
29	Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Laporan Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Sesuai	0	0	0%
VIII.2	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		0	0	0%
30	Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	0	0	0%

IX	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		23.600.000	23.100.000	98%
IX.1	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		0	0	0%
31	Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	Jumlah Kelompok Genre yang dibina	0	0	0%
32	Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	0	0	0%
33	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	0	0	0%
34	Penyediaan Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Jumlah Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	0	0	0%
IX.2	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		23.600.000	23.100.000	98%
	dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				

35	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	13.731.000	13.431.000	98%
36	Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Promosi tentang pemberdayaan ekonomi keluarga dan pengelolaan keuangan keluarga	9.869.000	9.669.000	98%

Realisasi anggaran pada Tahun 2025 pada beberapa program menunjukkan persentase yang relatif rendah. Kondisi tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan rendahnya kapasitas pelaksanaan program atau ketidakmampuan perangkat daerah dalam menyerap anggaran, melainkan dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada tahun berjalan.

Kebijakan efisiensi tersebut dilaksanakan melalui pengendalian belanja dan penyesuaian pelaksanaan kegiatan, yang berdampak pada tidak direalisasikannya sebagian anggaran yang telah direncanakan, meskipun secara teknis dan administratif kegiatan telah siap untuk dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya, efisiensi dilakukan dengan tetap menjaga keberlangsungan output dan kualitas layanan, sehingga perangkat daerah menyesuaikan volume dan skala kegiatan tanpa mengurangi capaian kinerja utama.

Dengan demikian, rendahnya persentase realisasi anggaran lebih mencerminkan adanya pengendalian belanja dalam rangka mendukung kebijakan efisiensi, bukan keterbatasan kemampuan perencanaan maupun pelaksanaan program. Perangkat daerah tetap berkomitmen pada pencapaian sasaran dan indikator kinerja, serta memastikan bahwa penggunaan anggaran dilakukan secara efektif, selektif, dan akuntabel sesuai dengan arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025 menunjukkan capaian kinerja yang positif dan berada pada jalur pencapaian target Rencana Strategis.

Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU), capaian kinerja Tahun 2025 menunjukkan hasil yang melampaui target tahunan. Indeks Pembangunan Gender (IPG) terealisasi sebesar 91,5, melampaui target 91,36, yang mencerminkan meningkatnya kesetaraan capaian pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) mencapai 0,399, lebih baik dari target 0,41, menunjukkan semakin menurunnya ketimpangan gender di Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya, Indeks Perlindungan Anak (IPA) terealisasi sebesar 68,66, melampaui target 63,7, yang mengindikasikan penguatan pemenuhan hak dan perlindungan anak. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) juga menunjukkan peningkatan dengan realisasi 62,9, lebih tinggi dari target 61,34, mencerminkan membaiknya kualitas ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Capaian kinerja tersebut didukung oleh beberapa faktor pendorong keberhasilan, antara lain penguatan koordinasi dan sinergi lintas perangkat daerah dan lintas sektor, implementasi kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan pemenuhan hak anak secara lebih terintegrasi, pemanfaatan data gender dan anak sebagai dasar perencanaan, serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia penyedia layanan. Selain itu, dukungan kebijakan dan

kolaborasi dengan mitra kerja, dunia usaha, media, dan masyarakat turut memperkuat efektivitas pelaksanaan program.

Meskipun demikian, pelaksanaan kinerja Tahun 2025 juga menghadapi beberapa tantangan, khususnya terkait penyesuaian kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada rendahnya persentase realisasi anggaran pada sebagian program.***

Sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi kinerja dan pelaksanaan anggaran Tahun 2025, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara akan melakukan langkah-langkah perbaikan dan penguatan kinerja sebagai berikut.

1. Penguatan kualitas perencanaan dan penganggaran melalui penyusunan rencana kerja yang lebih adaptif terhadap dinamika kebijakan fiskal, dengan mengedepankan prioritas program yang berdampak langsung pada pencapaian IKU. Perencanaan kegiatan akan disusun dengan fleksibilitas skenario pelaksanaan sehingga tetap memungkinkan penyesuaian tanpa mengurangi capaian kinerja utama.
2. Peningkatan integrasi perencanaan dan penganggaran responsif gender dan anak melalui optimalisasi penerapan PUG, PPRG, dan kebijakan pemenuhan hak anak di seluruh perangkat daerah terkait. Langkah ini bertujuan untuk memastikan program dan kegiatan lintas sektor saling mendukung dan berkontribusi langsung terhadap peningkatan IPG, penurunan IKG, peningkatan IPA, dan iBangga.
3. Optimalisasi pemanfaatan data dan sistem informasi melalui penguatan data gender, anak, dan keluarga sebagai dasar pengambilan keputusan dan penentuan sasaran program. Data yang akurat dan terpilah akan digunakan untuk meningkatkan ketepatan intervensi serta mendukung evaluasi kinerja yang lebih objektif dan terukur.
4. Penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, khususnya bagi lembaga penyedia layanan pemberdayaan

perempuan, perlindungan anak, dan pembangunan keluarga. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan kompetensi teknis, koordinasi, dan standardisasi layanan agar pelaksanaan program semakin efektif dan berkualitas.

5. Peningkatan kolaborasi dan kemitraan lintas sektor dengan perangkat daerah, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, media, dan masyarakat. Penguatan sinergi ini diharapkan dapat memperluas jangkauan layanan, meningkatkan keberlanjutan program, serta memperkuat dukungan terhadap pencapaian sasaran pembangunan perempuan, anak, dan keluarga.

Dengan langkah-langkah perbaikan tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja, efektivitas pelaksanaan program, serta akuntabilitas pengelolaan anggaran dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan.

Medan, Februari 2026

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA

DWI ENDAH PURWANTI, S.S, M.Si
NIP. 197301231998032002